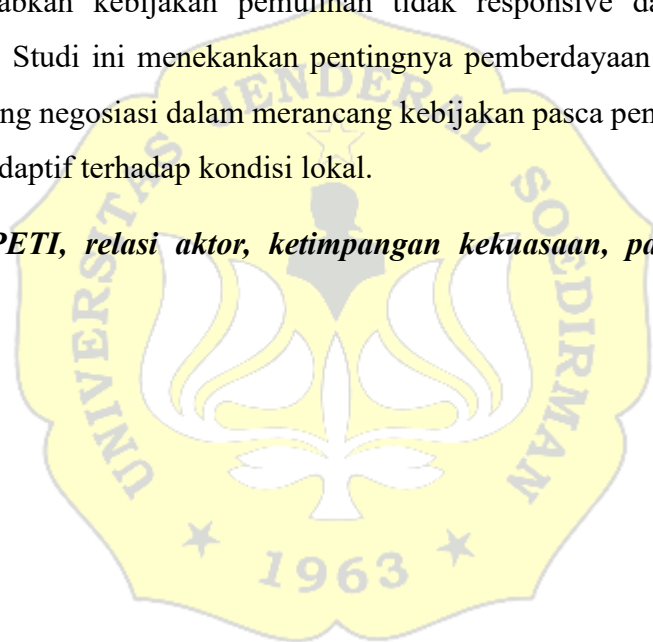


Abstrak

Penutupan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Pancurendang menyebabkan krisis sosial ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada tambang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teori relasi aktor untuk menganalisis dinamika kekuasaan dalam penanganan pasca penutupan tambang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten mendominasi kebijakan secara top-down tanpa melibatkan aktor lokal. Pemerintah desa memiliki legitimasi sosial tetapi minim kewenangan dan kapasitas, sementara masyarakat terdampak kehilangan agensi dan ruang partisipasi. Ketimpangan relasi kuasa menyebabkan kebijakan pemulihan tidak responsive dan menciptakan eksklusi sosial. Studi ini menekankan pentingnya pemberdayaan aktor lokal dan pembukaan ruang negosiasi dalam merancang kebijakan pasca penutupan tambang yang adil dan adaptif terhadap kondisi lokal.

Kata kunci: PETI, relasi aktor, ketimpangan kekuasaan, pasca penutupan tambang



Abstract

The closure of illegal gold mining (PETI) in Pancurendang Village has caused a socioeconomic crisis for communities dependent on the mine. This study uses a qualitative approach and actor relations theory to analyze the power dynamics in post-mine closure management. The results show that the district government dominates top-down policymaking without involving local actors. Village governments possess social legitimacy but lack authority and capacity, while affected communities lack agency and participation. This imbalance in power relations results in unresponsive recovery policies and creates social exclusion. This study emphasizes the importance of empowering local actors and opening up negotiation space in designing post-mine closure policies that are equitable and adaptable to local conditions.

Keywords: PETI, actor relations, power inequality, post-mine closure

